

Kemiskinan Struktural dan Kegagalan Intervensi Kebijakan: Perspektif Institusi, Akses Sumber Daya, dan Keadilan Sosial

Irma Nur Hayati^{1*}, Muhammad Iqbal², Muahammad Taufiq³

¹Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Indonesia

²Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

³Institut Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

*e-mail: irmanur551@gmail.com, baraasiqbalbaraas@gmail.com, m.taufiq12@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted 10 Oktober 2025
Revised 17 Oktober 2025
Accepted 20 November 2025
Published 10 Desember 2025

ABSTRACT

Structural poverty is a social problem that is not only related to low income but is also influenced by institutional inequalities, limited access to resources, and the weak implementation of social justice principles in development. This study aims to analyze the relationship between institutional structures, access to resources, and social justice in explaining the persistence of structural poverty, as well as identifying the factors contributing to the limitations of poverty alleviation policy interventions. This research employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of academic literature, policy documents, development reports, and relevant previous studies. Data were analyzed using content analysis and critical analysis techniques to identify patterns of relationships between institutions, resource distribution, and policy effectiveness. The findings indicate that structural poverty is formed through interactions between institutions that are not yet fully inclusive, unequal access to education, employment, capital, and public services, as well as limited participation of vulnerable groups in development processes. This study concludes that poverty alleviation requires a transformative approach that is not solely oriented toward economic assistance but also emphasizes institutional reform, expanded access to resources, and strengthened social justice as the foundation for inclusive and sustainable development.

Keywords: Structural Poverty, Institutions; Access To Resources, Social Justice, Poverty Alleviation Policy.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan global maupun nasional. Secara ideal, pembangunan ekonomi dan kebijakan publik seharusnya mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan karena masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan institusi yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Laporan Bank Dunia, menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan dasar, pekerjaan layak, serta partisipasi dalam proses pembangunan (Conable, 2020). Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ekonomi sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional. Namun, keberlanjutan kemiskinan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat individual, melainkan berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menghasilkan ketimpangan kesempatan.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) TANMIYAH: Jurnal Pendidikan dan Sosial.

Pada tingkat empiris, fenomena kemiskinan struktural masih terlihat pada kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sistemik dalam memperoleh akses terhadap sumber daya produktif. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, sebagian masyarakat miskin masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan kepemilikan aset, rendahnya kualitas pendidikan, sulitnya akses terhadap pasar kerja, lemahnya posisi tawar ekonomi, serta keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasinya. Intervensi yang sering kali berorientasi pada pemberian bantuan jangka pendek belum sepenuhnya mampu mengatasi akar persoalan kemiskinan yang berasal dari ketidaksetaraan struktur sosial dan kelembagaan. Dalam perspektif kemiskinan struktural (Taufik dkk., 2025), kemiskinan dipahami sebagai hasil dari proses sosial dan institusional yang menyebabkan kelompok tertentu terus berada dalam posisi marginal akibat distribusi sumber daya dan peluang yang tidak seimbang.

Permasalahan kemiskinan struktural menjadi semakin penting untuk dikaji karena kegagalan memahami akar penyebabnya dapat menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan secara parsial dan kurang berkelanjutan (Menton dkk., 2020). Ketika kebijakan hanya berfokus pada pengurangan angka kemiskinan secara administratif tanpa memperhatikan faktor struktural yang memproduksinya, maka masyarakat miskin berpotensi tetap berada dalam siklus ketergantungan dan reproduksi kemiskinan antar-generasi. Secara akademik, kajian mengenai kemiskinan struktural memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan, tata kelola institusi, distribusi kesempatan, dan prinsip keadilan sosial. Secara praktis, pemahaman tersebut penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan agar mampu merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif melalui perubahan sistem yang menciptakan kesempatan yang lebih adil.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami persoalan tersebut adalah perspektif institusi, akses sumber daya, dan keadilan sosial. Pendekatan institusional menjelaskan bahwa kualitas institusi, aturan formal maupun informal, serta mekanisme distribusi kewenangan memiliki peran penting dalam menentukan peluang masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan (Niño-Muñoz, 2023). Perspektif akses sumber daya menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan individu dan kelompok untuk mengakses, mengendalikan, serta memanfaatkan sumber daya tersebut (Ribot & Peluso, 2003). Sementara itu, perspektif keadilan sosial memberikan kerangka normatif bahwa pembangunan harus menjamin kesetaraan kesempatan, pengakuan terhadap kelompok rentan, dan distribusi manfaat pembangunan secara lebih adil (Ribotta, 2023). Ketiga perspektif tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengentasan kemiskinan mampu mengatasi faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara struktur sosial, institusi, dan keberlanjutan kemiskinan (Sigdel, 2025). Studi mengenai kemiskinan struktural menunjukkan bahwa kelompok miskin sering kali tidak hanya mengalami kekurangan pendapatan, tetapi juga menghadapi hambatan institusional yang membatasi mobilitas sosial mereka (Stoeffler & Joseph, 2020). Penelitian dalam perspektif pembangunan kritis menemukan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang hanya berorientasi pada bantuan ekonomi sering kali belum mampu mengubah struktur ketimpangan yang lebih mendalam (Deveaux, & Monique, 2021). Kajian mengenai institusi pembangunan juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, dan kemampuan negara dalam memastikan akses yang setara terhadap sumber daya (Gregorio dkk., 2008). Selain itu, penelitian mengenai keadilan sosial menegaskan bahwa strategi

pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan aspek partisipasi, pemberdayaan, dan pengakuan terhadap hak kelompok miskin sebagai subjek pembangunan.

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam memahami kemiskinan dan kebijakan pengentasannya, masih terdapat ruang kajian yang belum sepenuhnya terjelaskan. Sebagian penelitian lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi, sementara dimensi institusi, relasi kekuasaan, serta mekanisme distribusi akses sumber daya masih belum banyak dianalisis secara integratif (Herdt dkk., 2004). Selain itu, evaluasi terhadap kegagalan intervensi kebijakan sering kali lebih berfokus pada persoalan implementasi teknis, bukan pada pertanyaan mendasar mengenai apakah desain kebijakan tersebut telah menyentuh akar struktural kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis kemiskinan struktural dengan mengintegrasikan perspektif institusi, akses sumber daya, dan keadilan sosial sebagai kerangka konseptual untuk memahami keterbatasan maupun peluang transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemiskinan struktural terbentuk dan dipertahankan melalui faktor institusional, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta ketimpangan dalam perspektif keadilan sosial. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan serta merumuskan pemahaman konseptual mengenai strategi kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembangunan sosial, ekonomi politik, dan kebijakan publik dengan memperkuat perspektif struktural dalam memahami kemiskinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan struktural.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan konsep yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu, rendahnya motivasi, atau keterbatasan kemampuan personal, tetapi merupakan konsekuensi dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menghasilkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Selo Soemardjan menjelaskan bahwa kemiskinan struktural terjadi ketika suatu kelompok masyarakat tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia karena adanya hambatan dalam struktur sosial yang berlaku (Hakim, 2024). Perspektif ini menempatkan kemiskinan sebagai hasil dari proses sosial yang menyebabkan kelompok tertentu mengalami marginalisasi secara berkelanjutan. Dalam kajian kontemporer, kemiskinan struktural dipahami sebagai kondisi yang muncul akibat ketidakadilan sistemik dalam distribusi kesempatan, akses ekonomi, pendidikan, layanan publik, serta partisipasi politik. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang menentukan kualitas hidupnya.

Kemiskinan struktural memiliki beberapa dimensi utama yang dapat digunakan sebagai indikator analisis, yaitu dimensi ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan (Mashudi dkk., 2018). Dimensi ekonomi berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, modal, kepemilikan aset, dan peluang peningkatan pendapatan. Dimensi sosial mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, jaringan sosial, serta layanan dasar. Dimensi politik berhubungan dengan rendahnya keterlibatan kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan dan lemahnya representasi kepentingan mereka (Haider dkk., 2017). Sementara itu, dimensi kelembagaan melihat bagaimana aturan, kebijakan, dan mekanisme institusi dapat memperkuat atau mengurangi

ketimpangan. Karakteristik utama kemiskinan struktural adalah sifatnya yang berlangsung secara kronis, bersifat antargenerasi, serta sulit diputus tanpa adanya perubahan terhadap sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan tersebut.

2. Konsep Institusi, Akses Sumber Daya, dan Keadilan Sosial

a. Konsep Institusi

Institusi merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu sosial, ekonomi politik, dan pembangunan yang menjelaskan bagaimana aturan, norma, serta mekanisme sosial mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Menurut Douglass North, institusi merupakan “aturan main” (*rules of the game*) dalam masyarakat yang terdiri atas aturan formal seperti hukum, regulasi, dan kebijakan, serta aturan informal seperti norma, budaya, dan nilai sosial yang membentuk interaksi manusia (Hindriks & Guala, 2019). Institusi berfungsi menciptakan keteraturan, mengurangi ketidakpastian, serta menentukan bagaimana sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan didistribusikan. Dalam konteks pembangunan, kualitas institusi menjadi faktor penting karena institusi yang inklusif dapat memperluas kesempatan ekonomi dan sosial, sedangkan institusi yang eksklusif dapat mempertahankan ketimpangan melalui pembatasan akses terhadap sumber daya tertentu.

Dalam kajian kemiskinan struktural, institusi tidak hanya dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau lembaga formal, tetapi juga sebagai sistem aturan yang menentukan siapa yang memiliki akses, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya sosial. Institusi yang lemah, tidak transparan, atau tidak berpihak pada kelompok rentan dapat menghasilkan hambatan struktural yang menyebabkan masyarakat miskin sulit meningkatkan kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, analisis institusi dalam kajian kemiskinan mencakup beberapa aspek utama, yaitu kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, keadilan dalam distribusi kebijakan, akuntabilitas, serta tingkat inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok miskin memperoleh peluang yang setara.

b. Konsep Akses Sumber Daya

Konsep akses sumber daya menjelaskan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, menggunakan, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari berbagai sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Berbeda dengan konsep kepemilikan (*ownership*), akses menekankan aspek kemampuan aktual seseorang dalam memanfaatkan sumber daya, baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan (Nur, 2019). Menurut Ribot dan Peluso melalui teori akses (*Theory of Access*), akses dipahami sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu, yang dipengaruhi oleh berbagai mekanisme seperti hak hukum, hubungan sosial, teknologi, modal ekonomi, pengetahuan, serta kekuatan politik (Ribot & Peluso, 2003). Dengan demikian, seseorang dapat memiliki hak formal terhadap suatu sumber daya, tetapi belum tentu memiliki kemampuan nyata untuk mengakses manfaat dari sumber daya tersebut.

Dalam konteks kemiskinan struktural, keterbatasan akses terhadap sumber daya menjadi salah satu penyebab utama mengapa kelompok miskin mengalami kesulitan keluar dari kondisi marjinal (Dimas, 2025). Hambatan akses dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak, kepemilikan modal, teknologi, informasi, dan jaringan sosial. Dimensi utama dalam analisis akses sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya, kemampuan memperoleh sumber daya, kontrol terhadap penggunaan sumber daya, serta distribusi manfaat yang dihasilkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi juga oleh ketidaksetaraan mekanisme yang menentukan siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan konsep normatif yang menekankan terciptanya kondisi masyarakat yang adil melalui distribusi hak, kesempatan, kewajiban, dan manfaat pembangunan secara proporsional. Dalam perspektif John Rawls, keadilan sosial didasarkan pada prinsip bahwa struktur dasar masyarakat harus mampu menjamin kebebasan yang setara bagi setiap individu serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling kurang beruntung (Gökçekuyu, 2024). Konsep ini menolak pandangan bahwa ketimpangan sosial dapat diterima apabila hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi menekankan pentingnya pengaturan institusi sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata (Lechterman & Mair, 2024).

Dalam kajian kemiskinan struktural, keadilan sosial berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mampu mengatasi ketimpangan yang mendasar atau hanya memberikan solusi sementara. Prinsip keadilan sosial mencakup beberapa dimensi utama, yaitu kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*), distribusi sumber daya yang adil, pengakuan terhadap kelompok rentan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap hak dasar manusia (Kusnadi & Wulandari, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada keadilan sosial tidak hanya bertujuan mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga mengubah struktur yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat terus mengalami keterbatasan akses dan peluang.

3. Hubungan Kemiskinan Struktural, Institusi, Akses Sumber Daya, dan Keadilan Sosial

Secara teoretis, kemiskinan struktural memiliki keterkaitan yang kuat dengan kualitas institusi serta mekanisme distribusi akses terhadap sumber daya dalam masyarakat (Tebaldi & Mohan, 2010). Institusi berperan sebagai struktur pengatur yang menentukan bagaimana peluang, kewenangan, dan manfaat pembangunan didistribusikan kepada kelompok masyarakat (Altan, 2025). Ketika institusi tidak mampu menjalankan fungsi secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, maka dapat terbentuk hambatan sistemik yang menyebabkan masyarakat miskin tetap berada dalam posisi marginal. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, modal ekonomi, layanan kesehatan, teknologi, serta ruang partisipasi politik menjadi faktor yang mempersempit peluang mobilitas sosial dan memperkuat keberlangsungan siklus kemiskinan (Hisyam dkk., 2025). Dengan demikian, kemiskinan struktural tidak hanya dipahami sebagai akibat rendahnya pendapatan, tetapi sebagai konsekuensi dari struktur kelembagaan yang menghasilkan ketidaksetaraan kesempatan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberlanjutan kemiskinan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara ketimpangan ekonomi, kualitas tata kelola institusi, sistem pendidikan, struktur pasar kerja, serta kapasitas negara dalam menciptakan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat (Haider dkk., 2017).

Berdasarkan sintesis berbagai perspektif teoritis tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual bahwa kemiskinan struktural dipengaruhi oleh tiga aspek utama yang saling berhubungan, yaitu struktur institusional, akses terhadap sumber daya, dan prinsip keadilan sosial (Benassi dkk., 2026). Struktur institusional menentukan bagaimana aturan, kebijakan, dan mekanisme sosial membentuk distribusi peluang serta kewenangan dalam masyarakat. Sementara itu, akses terhadap sumber daya menjelaskan kemampuan aktual individu atau kelompok dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun perspektif keadilan sosial berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai apakah distribusi kesempatan dan manfaat pembangunan telah berlangsung secara adil, terutama bagi kelompok yang mengalami keterbatasan struktural. Kerangka ini menempatkan kemiskinan sebagai fenomena multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian bantuan ekonomi, tetapi membutuhkan perubahan terhadap struktur sosial dan kelembagaan yang menyebabkan ketimpangan.

Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini memandang bahwa kegagalan berbagai intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknis dalam implementasi program, tetapi juga karena belum optimalnya upaya untuk mengubah faktor struktural yang mempertahankan ketidaksetaraan (Oladejo & Adeosun, 2020). Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan pendapatan atau pemberian bantuan jangka pendek berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas apabila tidak disertai dengan perbaikan kualitas institusi, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penguatan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara institusi, akses sumber daya, dan keadilan sosial menjadi fokus analisis utama dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana ketiga aspek tersebut berinteraksi dalam membentuk keberhasilan maupun kegagalan intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pengurangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konseptual-kritis untuk mengkaji fenomena kemiskinan struktural serta kegagalan intervensi kebijakan melalui perspektif institusi, akses sumber daya, dan keadilan sosial (Yuniarti dkk., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konstruksi teoritis, mekanisme sosial, serta faktor kelembagaan yang menyebabkan keberlanjutan kemiskinan. Konteks penelitian mencakup kajian terhadap fenomena kemiskinan struktural dalam perspektif pembangunan sosial dan kebijakan publik, khususnya pada negara berkembang dengan perhatian pada konteks Indonesia. Sumber data penelitian berupa literatur ilmiah yang terdiri atas artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan lembaga nasional maupun internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta regulasi terkait program pengentasan kemiskinan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria relevansi teoritis, kredibilitas akademik, dan keterkaitan dengan fokus penelitian (Rosmita dkk., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi (Rokhamah dkk., 2024), menyeleksi, dan mengorganisasi berbagai sumber literatur yang membahas kemiskinan struktural, teori institusi, akses sumber daya, keadilan sosial, serta evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen dan matriks kajian literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep utama, perspektif teoritis, temuan penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan dokumen kebijakan dari sumber yang berbeda. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis dengan tahapan reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi hubungan antarkonsep, serta penyusunan sintesis teoritis mengenai faktor penyebab kemiskinan struktural dan keterbatasan intervensi kebijakan.

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen dan literatur publik (Ansari & Arifin, 2026), penelitian tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung sehingga tidak memerlukan prosedur intervensi atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Namun demikian, prinsip etika akademik tetap diterapkan melalui penggunaan sumber yang kredibel, pencantuman sitasi secara tepat, penghormatan terhadap hak intelektual, serta penyajian analisis secara objektif dan transparan. Metode ini dirancang agar dapat direplikasi melalui tahapan identifikasi sumber, proses seleksi literatur, teknik analisis, dan kerangka interpretasi yang jelas sehingga memungkinkan evaluasi akademik terhadap proses maupun hasil penelitian.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Kemiskinan Struktural sebagai Produk Ketimpangan Institusional dan Distribusi Kesempatan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa kemiskinan struktural terutama terbentuk melalui mekanisme institusional yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi kesempatan, kewenangan, dan akses terhadap sumber daya (Hickey & Toit, 2024). Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan ekonomi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan kelembagaan yang membatasi kelompok tertentu untuk memperoleh peluang peningkatan kesejahteraan. Dalam perspektif ini, kemiskinan merupakan kondisi yang diproduksi dan dipertahankan melalui sistem yang belum sepenuhnya mampu menciptakan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat (Kabeer, 2000).

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek utama yang menunjukkan hubungan antara institusi dan keberlanjutan kemiskinan struktural.

Indikator/Aspek	Hasil	Keterangan
Kualitas institusi	Institusi yang belum inklusif memperkuat ketimpangan akses	Kebijakan dan aturan sering belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan
Distribusi kesempatan	Terjadi kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, modal, dan layanan publik	Kelompok miskin mengalami hambatan mobilitas sosial
Partisipasi sosial-politik	Rendahnya keterlibatan kelompok miskin dalam pengambilan keputusan	Kepentingan kelompok rentan kurang terwakili

Tabel 1. Temuan Analisis Institusi sebagai Faktor Pembentuk Kemiskinan Struktural

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama kemiskinan struktural bukan hanya terletak pada keterbatasan ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga pada mekanisme kelembagaan yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan dan siapa yang mengalami keterbatasan akses (Altan, 2025). Pola yang ditemukan memperlihatkan bahwa kelompok miskin cenderung berada dalam posisi marginal karena menghadapi hambatan berlapis, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, kemiskinan menjadi fenomena yang bersifat sistemik karena dipengaruhi oleh cara institusi mengatur distribusi sumber daya.

Temuan tersebut memperkuat teori institusi yang dikemukakan oleh Douglass North bahwa institusi berfungsi sebagai “aturan main” yang menentukan pola interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Urbano dkk., 2019). Institusi yang inklusif akan menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang, sedangkan institusi yang eksklusif dapat mempertahankan ketimpangan melalui pembatasan akses terhadap sumber daya. Dalam konteks kemiskinan struktural, kualitas institusi menjadi faktor penting karena menentukan apakah kebijakan publik mampu menciptakan transformasi sosial atau justru mempertahankan pola ketidaksetaraan yang telah berlangsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu mengenai pembangunan dan kemiskinan yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas institusi. Penelitian mengenai pembangunan inklusif menunjukkan bahwa negara dengan institusi yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan layanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan (Ali, 2007). Temuan penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menekankan bahwa institusi bukan

hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat menghasilkan atau mengurangi kemiskinan struktural.

Kemunculan kemiskinan struktural akibat faktor institusional dapat dijelaskan melalui adanya ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan dengan mekanisme distribusi manfaat pembangunan (Gupta & Vegelin, 2023). Kebijakan yang dirancang secara universal sering kali belum mempertimbangkan kondisi spesifik kelompok rentan, sehingga manfaat program tidak selalu diterima secara optimal oleh masyarakat miskin. Selain itu, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta dominasi pendekatan administratif menyebabkan intervensi kebijakan sering berhenti pada pengurangan dampak kemiskinan tanpa menyentuh akar penyebabnya.

Implikasi dari temuan pertama ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada reformasi institusional yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang lebih adil. Pengurangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan ekonomi semata, tetapi membutuhkan perubahan dalam mekanisme kelembagaan yang mengatur distribusi sumber daya. Dengan demikian, pembangunan yang berorientasi pada penguatan institusi menjadi fondasi penting dalam memutus reproduksi kemiskinan struktural.

2. Keterbatasan Akses Sumber Daya sebagai Mekanisme Reproduksi Kemiskinan

Temuan kedua penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya merupakan mekanisme utama yang menyebabkan masyarakat miskin tetap berada dalam kondisi rentan (Sutter dkk., 2022). Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak selalu mengalami kemiskinan karena tidak adanya sumber daya, tetapi karena tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Dengan kata lain, persoalan utama terletak pada ketimpangan akses, bukan semata-mata ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan hasil kajian, hubungan antara akses sumber daya dan keberlanjutan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut.

Figure 1. Hubungan Keterbatasan Akses Sumber Daya dengan Reproduksi Kemiskinan Struktural

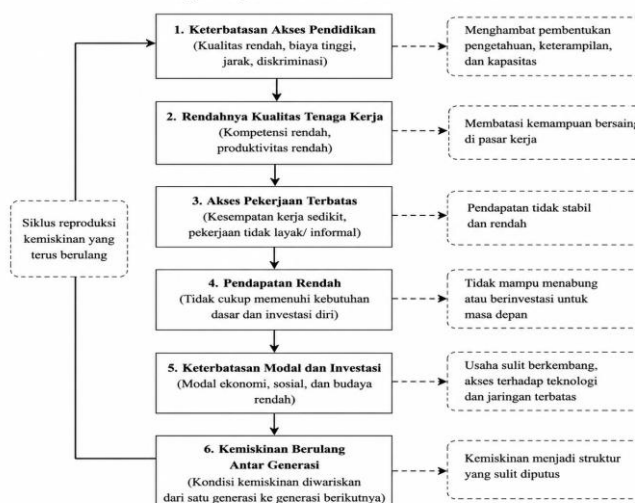


Diagram tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang bersifat siklus. Keterbatasan akses pada satu bidang dapat memperkuat keterbatasan pada bidang lainnya. Misalnya, rendahnya akses pendidikan dapat menyebabkan masyarakat sulit memperoleh pekerjaan formal, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan kemampuan meningkatkan kualitas hidup.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural memiliki karakter reproduktif, yaitu kondisi kemiskinan yang terus berulang karena masyarakat tidak memiliki instrumen yang cukup

untuk melakukan perubahan sosial ekonomi. Perspektif teori akses Ribot dan Peluso menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya ditentukan oleh berbagai faktor seperti aturan hukum, hubungan sosial, teknologi, modal, dan kekuasaan (Szaboova dkk., 2019). Oleh karena itu, kelompok miskin dapat mengalami keterbatasan meskipun sumber daya sebenarnya tersedia dalam lingkungan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan pendapatan (Zulkifli & Abidin, 2023). Studi pembangunan manusia menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan individu dalam meningkatkan kesejahteraan (Fuchs dkk., 2020). Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menempatkan akses sumber daya sebagai mekanisme struktural yang menghubungkan antara kondisi sosial masyarakat dengan keberhasilan pembangunan.

Faktor yang menyebabkan keterbatasan akses tersebut antara lain adalah ketimpangan distribusi aset, rendahnya kualitas layanan publik, keterbatasan informasi, serta lemahnya jaringan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, desain kebijakan yang terlalu berorientasi pada bantuan jangka pendek sering kali belum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Akibatnya, masyarakat tetap bergantung pada intervensi pemerintah tanpa mengalami peningkatan kemampuan struktural.

Implikasi temuan kedua menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus bergeser dari pendekatan bantuan menuju pendekatan pemberdayaan. Pemerintah dan lembaga pembangunan perlu memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, modal produktif, teknologi, serta ruang partisipasi sosial. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi sosial ekonominya.

3. Kegagalan Intervensi Kebijakan dan Kebutuhan Pendekatan Berbasis Keadilan Sosial

Temuan ketiga penelitian menunjukkan bahwa kegagalan sebagian intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan terjadi karena pendekatan kebijakan belum sepenuhnya menyentuh dimensi struktural yang menyebabkan ketimpangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar program masih berorientasi pada pengurangan dampak kemiskinan melalui bantuan sosial, sementara aspek transformasi institusi dan perubahan distribusi akses belum menjadi fokus utama.

Aspek	Temuan	Interpretasi
Orientasi kebijakan	Dominan bersifat jangka pendek	Mengurangi dampak tetapi belum menghilangkan akar masalah
Kelembagaan	Koordinasi antaraktor belum optimal	Mengurangi efektivitas implementasi
Keadilan sosial	Partisipasi kelompok miskin masih terbatas	Masyarakat belum sepenuhnya menjadi subjek pembangunan

Tabel 2. Analisis Faktor Kegagalan Intervensi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Hubungan antara ketiga temuan menunjukkan bahwa kemiskinan struktural merupakan hasil interaksi antara institusi yang belum sepenuhnya inklusif, keterbatasan akses sumber daya, dan lemahnya orientasi keadilan sosial dalam kebijakan. Institusi menentukan aturan distribusi kesempatan, akses sumber daya menentukan kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang tersebut, sedangkan keadilan sosial menjadi ukuran apakah proses pembangunan telah memberikan manfaat secara merata.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keadilan sosial John Rawls yang menekankan bahwa struktur dasar masyarakat harus memberikan perhatian terhadap kelompok yang paling kurang beruntung (Fleurbaey, 2018). Dalam konteks kebijakan kemiskinan, keberhasilan tidak hanya diukur

melalui penurunan angka kemiskinan, tetapi juga melalui kemampuan kebijakan dalam menciptakan kesempatan yang setara. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kelompok rentan berpotensi mempertahankan ketimpangan meskipun secara administratif menunjukkan keberhasilan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai studi terdahulu yang menekankan pentingnya pendekatan pembangunan inklusif (Saher dkk., 2024). Namun, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan tiga perspektif sekaligus, yaitu institusi, akses sumber daya, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan analisis. Pendekatan integratif ini memberikan pemahaman bahwa kegagalan kebijakan tidak hanya berasal dari masalah implementasi, tetapi juga dari desain kebijakan yang belum mampu mengubah struktur sosial penyebab kemiskinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang melihat kemiskinan struktural sebagai fenomena multidimensional yang terbentuk melalui hubungan antara aturan kelembagaan, distribusi sumber daya, dan prinsip keadilan sosial. Perspektif ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat kajian kemiskinan sebagai persoalan struktural, bukan sekadar persoalan ekonomi individu. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada transformasi sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kemiskinan struktural membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan bantuan menuju pendekatan transformasi. Kebijakan masa depan perlu memperkuat institusi yang inklusif, memperluas akses terhadap sumber daya, dan memastikan prinsip keadilan sosial menjadi dasar dalam setiap intervensi pembangunan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung kelompok miskin di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk memahami pengalaman masyarakat miskin dalam menghadapi hambatan struktural secara lebih mendalam.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural merupakan fenomena yang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur institusional, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam intervensi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi yang belum sepenuhnya inklusif dapat menciptakan hambatan sistemik bagi kelompok rentan, sementara keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, layanan publik, dan ruang partisipasi memperkuat keberlangsungan kemiskinan. Dengan demikian, kegagalan sebagian kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek implementasi, tetapi juga karena pendekatan kebijakan belum sepenuhnya menyentuh faktor struktural yang mempertahankan ketimpangan sosial.

Implikasi utama penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih transformatif melalui penguatan institusi yang inklusif, perluasan akses terhadap sumber daya, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek, tetapi perlu mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu keluar dari siklus kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman masyarakat miskin dalam menghadapi hambatan struktural. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris seperti studi lapangan, wawancara mendalam, atau analisis kebijakan pada wilayah tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika kemiskinan struktural.

Daftar Pustaka

- Ali, I. (2007). Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia. *Asian Development Review*, 24(2), 1–16. <https://doi.org/10.1142/s0116110507500060>
- Altan, H. (2025). Relationship between Underdevelopment and Established Organizations in a Country. *Ekonomik Yaklasim*, 36(136), 257. <https://doi.org/10.5455/ey.44002>
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Benassi, D., Mingione, E., & Morlicchio, E. (2026). *Urban poverty: From its origins to the contemporary global reality*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800889699.00006>
- Conable, B. B. (2020). *World Development Report*. Published for The World Bank Oxford University Press. <https://doi.org/10.1596/978-0-1952-0851-1>
- Deveaux, & Monique. (2021). *Poverty, Solidarity, and Poor-Led Social Movements*. <https://global.oup.com/>. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190850289.001.0001>
- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261>
- Fleurbaey, M. (2018). Priority to the Furthest Behind. *Journal of Globalization and Development*, 9(2). <https://doi.org/10.1515/jgd-2019-0039>
- Fuchs, D., Schlipphak, B., Treib, O., Long, L. A. N., & Lederer, M. (2020). Which Way Forward in Measuring the Quality of Life? A Critical Analysis of Sustainability and Well-Being Indicator Sets. *Global Environmental Politics*, 20(2), 12–36. https://doi.org/10.1162/glep_a_00554
- Gökçekuyu, E. (2024). John Rawls Approach Toward Fair Redistribution of Resources. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usdad/issue/89483/1550223>
- Gregorio, Hagedorn, M., Kirk, K., Korf, M., McCarthy, B., Meinzen-Dick, N., Swallow, R. S., & Brent, M. (2008). *Property Rights, Collective Action, and Poverty: The Role of Institutions for Poverty Reduction*. Working or Discussion Paper. <https://doi.org/10.2499/capriwp81>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2023). Inclusive development, leaving no one behind, justice and the sustainable development goals. *International Environmental Agreements Politics Law and Economics*, 23(2), 115–121. <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09612-y>
- Haider, L. J., Boonstra, W. J., Peterson, G., & Schlüter, M. (2017). Traps and Sustainable Development in Rural Areas: A Review. *World Development*, 101, 311–321. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.038>
- Hakim, D. K. (2024). *Yang Terhempas yang Terdampar (Proses Pemiskinan Masyarakat Melayu: Perspektif Antropologi Sosial)*. Penerbit Adab.
- Herd, T. D., Bastiaansen, J., & D'Exelle, B. (2004). Towards a local socio-institutional analysis of anti-poverty interventions: A critical review of methods and researchers. *RePEc: Research Papers in Economics*.
- Hickey, S., & Toit, A. du. (t.t.). *Adverse Incorporation, Social Exclusion, and Chronic Poverty*. https://doi.org/10.1057/9781137316707_7
- Hindriks, F., & Guala, F. (2019). The functions of institutions: Etiology and teleology. *Synthese*, 198(3), 2027–2043. <https://doi.org/10.1007/s11229-019-02188-8>
- Hisyam, C. J., Making, E. K., Pratama, R. A. A., Priambodo, R., Baihaqqi, R. F., & Ravelia, V. (2025). Kemiskinan Struktural Terhadap Masyarakat Marginal: Studi Kasus di Pemukiman Pemulung Wilayah Bintara Jaya, Bekasi Barat. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2), 307–321. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v3i2.5282>

- Kabeer, N. (2000). Social Exclusion, Poverty and Discrimination Towards an Analytical Framework. *OpenDocs (Institute of Development Studies)*, 31(4), 83–97. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2000.mp31004009.x>
- Kusnadi, K., & Wulandari, N. A. T. (2024). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 539–551. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>
- Lechterman, T. M., & Mair, J. (2024). Social Enterprises as Agents of Social Justice: A Rawlsian perspective on institutional capacity. *Organization Studies*, 45(9), 1301–1323. <https://doi.org/10.1177/01708406241261435>
- Mashudi, M., Fauziah, L., & Agustina, I. F. (2018). Poverty Alleviation Based On Participatory Rural Appraisal- (Pra) In Sidoarjo Regency. *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 34(1), 112–120. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i1.3168>
- Menton, M., Larrea, C., Latorre, S., Alier, J. M., Peck, M., Temper, L., & Walter, M. (2020). Environmental justice and the SDGs: From synergies to gaps and contradictions. *Sustainability Science*, 15(6), 1621–1636. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00789-8>
- Niño-Muñoz, D. (2023). Institutional Development in Main Colombian Cities: What Is Its Relation to Subjective Poverty? *Latin American Research Review*, 58(4), 837–857. <https://doi.org/10.1017/lar.2023.12>
- Nur, H. (2019). Pemberdayaan Perempuan Miskin Pesisir Melalui Penguatan Industri Kecil Rumah Tangga (Study pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat). *Equalita Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5463>
- Oladejo, B., & Adeosun, O. A. (2020). *The Effectiveness of Poverty Alleviation Policy: Why is the Quality of Institutions the Bane in Nigeria?* Madras Institute of Development Studies. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972266120975262>
- Ribot, J., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access*. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Ribotta, S. (2023). Poverty as a matter of justice. *The Age of Human Rights Journal*, (20). <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>
- Rokhamah, R., Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, I., Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Noviana, R., Bawono, Y., & Rianto, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/568101/metode-penelitian-kualitatif-teori-metode-dan-praktik>
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera. <https://www.google.com/books>
- Saher, L., Tabák, L., Lyeonov, S., & Vasa, L. (2024). Inclusive growth: Literature review. *Journal Of International Studies*, 17(1), 205–232. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-1/12>
- Sigdel, B. R. (2025). Poverty as a Social Fact: Can It Be Eliminated or Only Reduced? *Journal of Productive Discourse*, 3(1). <https://doi.org/10.3126/prod.v3i1.78472>
- Stoeffler, S. W., & Joseph, R. (2020). Etiology of Poverty: A Critical Evaluation of Two Major Theories. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 47(1). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.4269>
- Sutter, C., Bhatt, B., & Qureshi, I. (2022). What Makes Resource Provision an Effective Means of Poverty Alleviation? A Resourcing Perspective. *Organization Science*, 34(1), 223–245. <https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1570>

- Szaboova, L., Brown, K., & Fisher, J. (2019). Access to Ecosystem Benefits: More than Proximity. *Edinburgh Research Explorer*, 33(2), 244–260. <https://doi.org/10.1080/08941920.2018.1556759>
- Taufik, I., Kinseng, R. A., & Pandjaitan, N. K. (2025). Unraveling structural poverty: Insights from small-scale fishermen's households on the coast of Muara Gembong, Indonesia. *Simulacra Jurnal Sosiologi*, 8(2), 207–224. <https://doi.org/10.21107/sml.v8i2.30463>
- Tebaldi, E., & Mohan, R. (2010). Institutions and Poverty. *The Journal of Development Studies*, 46(6), 1047–1066. <https://doi.org/10.1080/00220380903012730>
- Urbano, D., Audretsch, D. B., Aparicio, S., & Noguera, M. (2019). Does entrepreneurial activity matter for economic growth in developing countries? The role of the institutional environment. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 16(3), 1065–1099. <https://doi.org/10.1007/s11365-019-00621-5>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit NEM. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=cW7KEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=metode+penelitian+kualitatif+sosial+2023&ots=vTP_jut5UF&sig=auoF2J4xuBRR5FebR9fMvAtOZcw
- Zulkifli, F., & Abidin, R. Z. (2023). The Multi-Dimensional Nature of Poverty: A Review of Contemporary Research. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 12(2). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i2/17260>